

KLIPING BERITA

Sumber : Suara NTB

16 Februari 2023

Fokus Tuntaskan Rekomendasi BPK

BYSUARANTB.COM 16 FEBRUARI 2023



H. Ridwan Syah (Suara NT/ist)

TAHUN Anggaran 2023 sudah memasuki bulan kedua. Dinas PUPR Provinsi NTB tidak hanya fokus mempersiapkan program dan kegiatan yang sudah termuat dalam DPA 2023, namun juga berkomitmen untuk semakin memantapkan tata kelola dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUPR.

Salah satu yang menjadi fokus Kepala Dinas PUPR NTB. Ir. H.Ridwan Syah, MTP adalah menindaklanjuti temuan BPK terhadap program pembangunan jalan yang dibiayai melalui PEN. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah diterima akhir Desember 2022. Jika dibandingkan dengan OPD lain, PUPR lebih beruntung karena sebagian kegiatan 2022 sudah diaudit BPK.

Dalam LHP tersebut terungkap bahwa pada 15 paket pekerjaan terdapat kekurangan volume sebesar Rp14,49 miliar. Atas temuan tersebut, masing-masing rekanan yang mengerjakan paket tersebut diperintah untuk menyetor kelebihan bayar senilai kekurangan volume kepada ke kas daerah. Menurut regulasi tenggat waktunya 60 hari sejak LHP diterima. Kewajiban setor kembali dari masing-masing rekanan nilainya bervariasi.

Menurut Ridwan Syah, pihaknya sudah berkoordinasi dengan semua rekanan dan mereka siap melaksanakan setor kembali sesuai rekomendasi. Kesiapan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan dan sejauh ini progress pembayarannya sangat signifikan.

Ada yang sudah membayar secara bertahap bahkan sudah ada yang menyelesaikan 100 persen. Prinsipnya, begitu pembayaran pekerjaan dituntaskan oleh pengguna, maka rekanan langsung menyelesaikan.

Ridwan Syah menyangkan ada pihak yang mempolitisir temuan ini dan ingin menyeretnya menjadi persoalan hukum. "Tidak ada satupun entitas yang tidak memiliki temuan pemeriksaan," kata Ridwan Syah. Sepanjang kita komit untuk menindaklanjuti hasil temuan maka persoalannya clear. Terkecuali dalam temuan pemeriksaan diungkap adanya tindak pidana.

"Alhamdulillah, dari LHP yang sudah kami terima tidak ada satupun temuan yang termasuk dalam kategori fraud," katanya.

"Sekali lagi tegas Ridwan Syah, kami akan segera menuntaskan tindak lanjut rekomendasi BPK. Ini bagian dari ikhtiar dan sumbangsih Dinas PUPR kepada daerah agar predikat WTP kembali diraih oleh Provinsi NTB," pungkasnya. **(r)**